

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dalam dua dekade terakhir, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat masih cukup lebar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rasio Gini Indonesia pada tahun 2023 adalah 0,388, menunjukkan tingkat ketimpangan yang mendekati tinggi dan sangat perlu menjadi perhatian.

Ketimpangan yang tinggi tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam mendistribusikan hasil pembangunan secara adil. Hal ini juga berpotensi memicu instabilitas sosial, memperlemah mobilitas ekonomi antar kelompok, serta menurunkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Pemerataan pendapatan adalah merupakan indikator penting untuk melihat keadaan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan pemerataan pendapatan akan menyebabkan masalah ketimpangan pendapatan akan semakin besar dan susah untuk diatasi. Padahal salah satu tujuan utama pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan,

perbedaan dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat.



Pembangunan ekonomi suatu negara pada umumnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan secara merata. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial kemasyarakatan, kesiapan mental berkemajuan untuk menjalani proses akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang terus menjadi masalah dalam sebuah negara.

Pada awalnya upaya pembangunan Negara sedang berkembang direncanakan dengan meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita diharapkan mampu menyelesaikan masalah masalah perekonomian yang dihadapi seperti pengangguran, kemiskinan dan tidak meratanya distribusi pendapatan di kalangan masyarakat atas, menengah dan kebawah. Namun, kenyataannya jauh berbeda dengan yang diharapkan dan direncanakan, hal ini terjadi karena angka-angka yang ditunjukkan oleh pendapatan domestik dan nasional bruto belum sepenuhnya mengatasi masalah masalah kemiskinan dan pengangguran.

Ketimpangan pendapatan mengacu pada perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan antar penduduk, yang mengakibatkan kesenjangan dalam kesejahteraan ekonomi dan akses terhadap sumber daya (Stiglitz, 2012). Ketimpangan yang tinggi tidak hanya memicu berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakstabilan politik, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena terbatasnya akses sebagian cat terhadap peluang ekonomi yang sama (Piketty, 2014).



Data gini rasio dan indeks theil dari tahun 2013 sampai tahun 2022 menunjukkan penurunan. Namun penurunan tersebut belum sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dan gini rasio tersebut masih pada tingkat ketidaksetaraan sedang, dimana distribusi pendapatan atau kekayaan memiliki tingkat ketidaksetaraan yang cukup terlihat. Bahkan mendekati tingkat ketidaksetaraan tinggi dimana distribusi pendapatan atau kekayaan cenderung tidak merata.



Sumber : BPS 2023 (diolah)

Gambar 1. 1 Gini Rasio dan Indeks Theil

Grafik Gini Rasio dan Indeks Theil di atas memperlihatkan perkembangan ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2013–2023 berdasarkan dua ukuran utama, yaitu Gini Rasio dan Indeks Theil. Gini Rasio menunjukkan tren



in dari 0,413 pada 2013 hingga titik terendah 0,381 pada 2020, kemudian meningkat menjadi 0,388 pada 2023. Sementara itu, Indeks Theil hatkan pola penurunan yang lebih tajam, dari 1,63 pada 2013 hingga

1,04 pada 2023. Kedua indikator ini sama-sama menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan selama satu dekade terakhir. Namun, baik Gini maupun Theil masih berada pada level yang cukup tinggi, sehingga ketimpangan tetap menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian kebijakan.

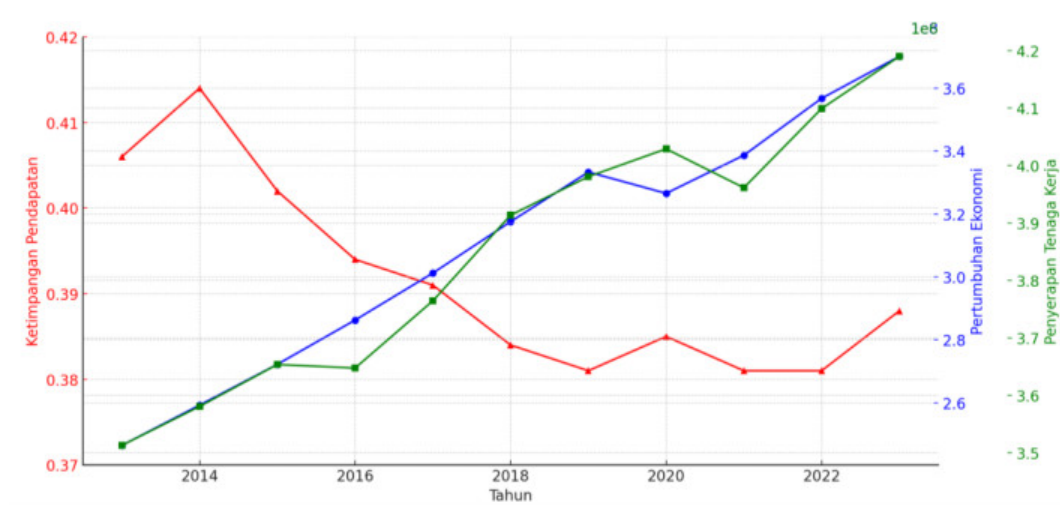
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui hipotesis Inverted-U Kuznets (1955), di mana ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan, kemudian menurun ketika ekonomi telah lebih matang. Indonesia tampaknya sedang berada dalam fase penurunan ketimpangan, tetapi laju penurunannya masih lambat dan belum menyentuh akar permasalahan. Selain itu, kondisi ini juga menguatkan analisis Piketty (2014), yang menegaskan bahwa tanpa kebijakan redistribusi yang progresif, ketimpangan cenderung bertahan bahkan meningkat, karena akumulasi kekayaan lebih cepat tumbuh dibanding pendapatan produktif ($r > g$). Dengan demikian, meskipun indikator ketimpangan menurun, jurang sosial-ekonomi tetap melebar antara kelompok kaya dan miskin, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini tidak hanya menjadi tantangan ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh sebab itu, kebijakan yang lebih tegas diperlukan, seperti reformasi fiskal, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan instrumen keuangan syariah dan sektor riil untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif.

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas rga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya an jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam



suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Menurut Michael P. Todaro, ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara, yang pertama adalah akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi dan kedua adalah pertumbuhan penduduk yang akan menambah jumlah angkatan kerja beberapa tahun berikutnya, dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Indikator yang menjadi alat ukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB).



Sumber: BPS 2023 (diolah)

Gambar 1. 2 Grafik Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Selama sebelas tahun terakhir (2013–2023), Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, tercermin dari peningkatan signifikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di periode yang sama, penyerapan tenaga kerja juga mengalami tren peningkatan yang cukup tajam, menandakan bahwa perekonomian mampu menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk. Namun, menarik untuk dicermati bahwa kemajuan pada dua indikator ekonomi ini tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan yang substansial sebagaimana diharapkan.

Data menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan pendapatan mengalami sedikit penurunan, perubahan tersebut relatif terbatas dan lambat. Hal ini tercermin jelas dari grafik yang menampilkan tren ketimpangan pendapatan dalam skala ketat, di mana pergerakannya relatif datar dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Dengan kata lain, kemajuan dalam indikator pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja belum cukup efektif dalam menciptakan pemerataan distribusi pendapatan.

Situasi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas saja tidak secara otomatis mengurangi ketimpangan pendapatan secara substansial. Hal ini sejalan dengan pandangan para ekonom seperti Thomas Piketty dan Simon Kuznets, yang menekankan bahwa ketimpangan memerlukan intervensi kebijakan khusus yang berorientasi pada redistribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial secara lebih terarah.



Am konteks kebijakan, kondisi ini mengisyaratkan perlunya pemerintah kan strategi pembangunan inklusif yang lebih efektif. Kebijakan tersebut nya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi atau

peningkatan jumlah tenaga kerja, tetapi juga memastikan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang menjamin kesejahteraan bersama, dapat tercapai secara lebih optimal.

Jika kita lihat dari jalur agregat demand kita bisa melihat bahwa membangun sebuah ekonomi sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang biasa diartikan sebagai proses kenaikan produksi ekonomi suatu negara yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Pengukuran pertumbuhan ekonomi Indonesia menggunakan Produk Domestik Bruto atau lebih dikenal dengan *Gross Domestic Product (GDP)* atas harga konstan.

Menurut Sutomo DA (2024) Tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap disparitas regional. Peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi tertentu cenderung mendorong peningkatan tingkat disparitas di Indonesia. Melihat PDB Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Namun demikian dalam waktu yang sama, tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin dan penduduk kaya di Indonesia. Koefisien gini rasio dalam beberapa tahun ini hanya 0.381 yang menandakan bahwa ketimpangan pendapatan masih dalam tingkat sedang mendekati tinggi.

Dudley Seers, mengemukakan bahwa tolak ukur pembangunan ekonomi



tidak hanya pada peningkatan pendapatan perkapita tetapi hendaknya juga disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Menurut Kuznets (1955) menyatakan bahwa Pertumbuhan

Ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan menurun (an inverse U shaped pattern). Beberapa ekonom pembangunan tetap berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan Ketimpangan Pendapatan yang dikemukakan Kuznets tidak dapat dihindari.

Lebih lanjut Kuznets menjelaskan ketimpangan dalam pembagian pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal pembangunan, baru kemudian selama tahap tahap lebih lanjut dari pembangunan berbalik menjadi lebih kecil. Dengan kata lain bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan. Dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan, namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Angka pertumbuhan juga belum merata ke setiap daerah di Tanah Air. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi nasional itu hanya dinikmati oleh sedikit golongan dan belum diikuti dengan peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Manakala dari jalur agregat supply pula yang diwakili oleh variabel penyerapan tenaga kerja juga berperan penting dalam membentuk struktur ketimpangan pendapatan di berbagai negara. Piketty (2014) menjelaskan bahwa gan pendapatan disebabkan oleh ketimpangan upah yang semakin lebar naga kerja berketerampilan tinggi dan rendah. Kondisi ini menunjukkan



bahwa ketika pasar tenaga kerja lebih banyak menyerap tenaga kerja berketerampilan tinggi, tenaga kerja dengan keterampilan rendah cenderung tertinggal dengan upah yang lebih rendah, yang pada akhirnya memperlebar jurang ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, orientasi penyerapan tenaga kerja yang lebih memihak tenaga kerja berketerampilan tinggi menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, di mana tenaga kerja berketerampilan rendah terjebak pada lapangan pekerjaan dengan penghasilan minimal.

Pandangan ini sejalan dengan argumen De Soto (2000), yang menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan hasil dari sistem kapitalisme dan mekanisme pasar bebas yang diadopsi secara luas. Sistem ini mendorong efisiensi ekonomi namun sering mengabaikan prinsip keadilan sosial. Dalam konteks penyerapan tenaga kerja, kapitalisme lebih menguntungkan pekerja di sektor formal yang perkapita tinggi, sementara pekerja di sektor informal atau yang memiliki keterbatasan regulasi sering kali menerima gaji yang tidak memadai. Ketimpangan ini diperburuk dengan penyerapan tenaga kerja yang secara struktural lebih mendukung mereka yang berada di sektor-sektor berkapital besar, sedangkan tenaga kerja berketerampilan rendah di sektor-sektor informal menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendapatan yang layak, sehingga memperparah ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.

Meskipun penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dalam beberapa dekade terakhir, distribusi pendapatan yang tidak masih menjadi tantangan serius. Berbagai faktor ekonomi dan kebijakan juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan



pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui efeknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai faktor ekonomi dan kebijakan publik diduga memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan. Penelitian ini berfokus pada empat faktor utama yaitu pengaruh belanja infrastruktur, inflasi, upah minimum, dan instrumen keuangan syariah serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi ketimpangan melalui penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Endogen menyoroti peran investasi dalam peningkatan kapasitas dan produktivitas ekonomi. Belanja infrastruktur, jika diarahkan dengan baik, dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas infrastruktur seperti transportasi dan energi dapat membuka peluang ekonomi baru dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan. Belanja infrastruktur juga dapat dilihat dari perspektif teori ekonomi regional. Infrastruktur yang baik dapat membuka daerah-daerah tertentu untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi, membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Akumulasi modal meliputi semua jenis investasi baru baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang ditanamkan dengan bentuk tanah, peralatan fisik, dan modal sumber daya. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar output atau pendapatan di kemudian hari. Semakin banyak suatu perekonomian menabung dan menginvestasikan maka semakin pesat

ihan ekonominya (Todaro, 2000; Perkins, dkk, 2012)



Teori Keynesian menyatakan bahwa belanja pemerintah, termasuk belanja infrastruktur, dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama dalam situasi ketika ekonomi sedang mengalami resesi atau stagnasi. Dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, termasuk investasi dalam proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan proyek konstruksi lainnya, dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, proyek infrastruktur seringkali melibatkan banyak pekerjaan, yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Belanja infrastruktur memiliki peran krusial dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi regional (Todaro & Smith, 2020). Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi kesenjangan antar daerah dengan membuka peluang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja.

Calderon dan Serven (2004) menyatakan bahwa infrastruktur fisik dapat mengurangi ketimpangan melalui peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, infrastruktur juga dapat memperburuk ketimpangan jika distribusinya tidak merata (Bajar dan Rajeev, 2016; Makmuri, 2017). Studi lain, seperti Brakman et al. (2002), menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur dapat meningkatkan disparitas regional, terutama jika investasi lebih banyak diarahkan pada wilayah yang sudah maju.

Selain dari sisi kebijakan fiskal, dari sisi moneter yakni inflasi, juga memberikan pengaruh terhadap ketimpangan melalui penyerapan tenaga kerja.

Menurut Indriyani (2016) inflasi memberikan dampak dan pengaruh pada kegiatan perekonomian di suatu negara. Inflasi adalah harga barang yang mengalami peningkatan secara keseluruhan. Inflasi ini akan terjadi jika banyak



harga barang naik secara serentak selama beberapa periode waktu (Case & Fair, 2006)

Inflasi adalah sebuah keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (price level) dan bersifat secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus barang dan arus uang yang di sebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi juga merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis perekonomian selain pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan ekspor-impor. Inflasi merupakan masalah yang sangat besar dalam perekonomian setiap negara dan merupakan suatu fenomena moneter yang selalu meresahkan negara karena kebijakan yang diambil untuk mengatasi inflasi sering menjadi pisau bermata dua yang akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregat. Terjadinya goncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik yang berakhir dengan peningkatan inflasi pada perekonomian.

Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Menurut kurva Phillips, terdapat trade-off antara inflasi dan pengangguran. Saat pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran cenderung menurun, tetapi inflasi dapat meningkat. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran meningkat, inflasi cenderung menurun. Menurut Paddu A.H. (2017) Inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah tingkat penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi. Ini menunjukkan bahwa inflasi akan mengurangi

li riil masyarakat, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa



menurun. Penurunan permintaan menyebabkan penurunan tingkat produksi, yang pada akhirnya akan mengurangi kebutuhan terhadap tenaga kerja.

Teori Spillover Upah menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum di sektor formal dapat menyebabkan efek limpahan ke sektor informal, namun sektor informal tidak selalu mampu menyesuaikan diri, sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok (Sabia, 2015). Tenaga kerja merupakan seseorang yang menginginkan sumber pendapatan, sumber pendapatan ini didapatkan oleh tenaga kerja setelah mereka bekerja dengan harapan mendapatkan upah dalam bentuk uang (O'Higgins & Ivanov, 2006). Upah merupakan imbalan yang diberikan kepada para pekerja dalam bentuk uang. Besar atau kecilnya tingkat upah yang dibuat oleh pemerintah akan berpengaruh pada permintaan penggunaan tenaga kerja. Upah harus mencerminkan apa yang telah diberikan oleh pekerja kepada perusahaan. Menurut (Gregory & Zierahn, 2022) para pekerja yang mempunyai keterampilan dan pendidikan lebih memiliki peluang untuk mendapatkan upah yang tinggi.

Menurut Simanjuntak (1992) mengatakan bahwa kenaikan upah minimum dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja dengan pendidikan dan produktivitas tinggi dengan tingkat upah yang tinggi juga. Berkaitan dengan tenaga kerja, meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat Pendidikan berhubungan dengan SDM, upah minimum dan penyerapan tenaga kerja.



ori yang berhubungan dengan upah yaitu *efficiency wage theory* yaitu in upah minimum yang memungkinkan tenaga kerja dalam meningkatkan nya. Pandangan lain dari teori ekonomi neoklasik ini yaitu temuan empirik

baru dari *Smeru Research Institute* dan Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas. Ditemukan 40 persen unit usaha minimum ini memiliki hubungan negatif terhadap kesempatan kerja dalam sektor formal di perkotaan.

Lebih lanjut, Navarro (2007) menekankan bahwa ketimpangan pendapatan semakin tajam akibat perkembangan otomatisasi yang mengubah pola kebutuhan keterampilan di pasar tenaga kerja. Otomatisasi mengurangi permintaan untuk pekerjaan manual atau berketerampilan rendah dan, sebaliknya, menuntut keterampilan yang lebih tinggi untuk memperoleh gaji yang layak. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja berketerampilan rendah menjadi terbatas, sementara permintaan akan tenaga kerja berketerampilan tinggi semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kesenjangan upah yang semakin besar karena tenaga kerja berketerampilan rendah tidak memiliki kapasitas untuk bersaing dalam sektor-sektor bergaji tinggi. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja yang lebih mengutamakan keterampilan tinggi, ditambah dengan pengaruh kapitalisme dan otomatisasi, telah memperlebar ketimpangan pendapatan, di mana tenaga kerja berketerampilan rendah semakin terpinggirkan dari akses ke pekerjaan dengan upah yang memadai.

Para pakar ekonomi melihat bahwa ekspansi lembaga keuangan memiliki peran dalam alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Banyak peneliti sepakat tentang pentingnya peran sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi riil, baik di tingkat nasional dan internasional (Kunt, Laeven, & Levine, 2003; Love, 2003; Seven & Yetkiner, 2015). Sektor keuangan memainkan peran penting jika

menyalurkan sumber daya keuangan ke industri dengan peluang yang baik. Ketika sektor keuangan lebih berkembang, maka lebih



banyak sumber daya keuangan dapat dialokasikan ke dalam investasi riil produktif dan lebih banyak modal fisik terbentuk, yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Sering kali pertumbuhan pada sektor keuangan tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai intermediasi keuangan, atau sering disebut dengan Money Concentration (Konsentrasi Keuangan). Hal tersebut disebabkan karena aliran dana pada sektor keuangan tersebut hanya berputar pada sektor keuangan saja atau tidak terdistribusi maksimal pada sektor riil sehingga dapat mengganggu perkembangan ekonomi (Juhro et al, 2018).

Aktivitas investasi dalam sektor riil sangat dititik beratkan pada instrumen keuangan syariah. Peran dan fungsi ekonomi serta keuangan syariah dalam sistem keuangan saat ini lebih diharapkan, terlebih pengalaman krisis keuangan telah menyadarkan kembali akan pentingnya aktivitas lembaga keuangan untuk mengembangkan sektor riil dalam aktivitas produksi barang ataupun jasa. Ekonomi dan keuangan syariah, secara konsep telah berbasis kepada transaksi riil yang jauh dari praktek spekulatif.

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat muslim. Praktisi pasar modal pun menyadari potensi tersebut untuk menghimpun dana umat muslim untuk diinvestasikan. Instrumen keuangan syariah, terutama dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank syariah, memiliki potensi untuk berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui dua saluran utama:



an tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Bank syariah mengelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada aktivitas ekonomi riil dari spekulasi. Dana yang terkumpul dari masyarakat ini disalurkan

kembali ke sektor-sektor produktif, seperti usaha kecil dan menengah (UKM), yang seringkali terabaikan oleh perbankan konvensional. Melalui pembiayaan ini, bank syariah dapat mendukung penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor yang berorientasi pada sektor riil dan padat karya. Penyerapan tenaga kerja dari usaha-usaha yang dibiayai oleh bank syariah berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, sehingga dapat memperkecil kesenjangan pendapatan.

Instrumen keuangan syariah penting dimasukkan dalam model penelitian ini karena secara teoritis menawarkan mekanisme keuangan yang berbeda dari sistem konvensional, dengan orientasi keadilan distributif, kemitraan, dan inklusi. Dalam kerangka teori ekonomi konvensional, seperti yang dikemukakan oleh Stiglitz (2012), ketimpangan pendapatan kerap kali disebabkan oleh akses keuangan yang timpang, dominasi kapital, dan mekanisme pasar yang bias terhadap kelompok berpenghasilan tinggi. Sistem keuangan syariah hadir dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba, pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta kewajiban sosial seperti zakat dan wakaf, yang secara normatif dapat memperkuat peran redistributif dan memperluas akses ekonomi bagi kelompok rentan (Chapra, 2000).

Lebih lanjut, dalam perspektif *developmentalism*, peran institusi domestik dan nilai-nilai lokal menjadi sangat penting dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan. Model *developmentalist* menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada

; lembaga sosial, nilai-nilai budaya, dan kemandirian institusional dalam
hkan transformasi ekonomi (Evans, 1995). Dalam konteks Indonesia



yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan lembaga keuangan syariah mencerminkan bentuk institusional lokal yang potensial untuk menjalankan fungsi pembangunan secara endogen. Dengan melibatkan sistem keuangan yang selaras dengan norma sosial dan religius masyarakat, instrumen keuangan syariah tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga wahana sosial untuk menyelesaikan masalah ketimpangan secara struktural dan berkelanjutan.

Selain itu, instrumen keuangan syariah juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mendorong akumulasi modal dan investasi yang berdampak positif pada produktivitas ekonomi. Dalam sistem keuangan syariah, konsep bagi hasil (profit and loss sharing) mendorong pengusaha untuk bekerja secara efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan output dan nilai tambah ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, distribusi pendapatan di masyarakat diharapkan menjadi lebih merata. Pengembangan DPK oleh bank syariah juga mendorong peningkatan inklusi keuangan, yang membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani (unbanked) oleh lembaga keuangan. Peningkatan akses keuangan ini memungkinkan lebih banyak individu dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi produktif, yang secara keseluruhan dapat memperkecil ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu struktural yang terus membayangi pembangunan ekonomi Indonesia, meskipun negara ini telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam dua dekade terakhir.



gan yang tinggi tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam busikan hasil pembangunan secara adil, tetapi juga berpotensi memicu

instabilitas sosial, memperlemah mobilitas ekonomi antar kelompok, serta menurunkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam konteks dinamika ekonomi Indonesia kontemporer.

Penelitian ini menjadi urgen karena mengintegrasikan empat variabel eksogen penting yang selama ini menjadi fokus kebijakan ekonomi nasional, yaitu belanja infrastruktur, inflasi, upah minimum, dan instrumen keuangan syariah, untuk menguji pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan. Setiap variabel tersebut memiliki konsekuensi ekonomi yang berbeda. Belanja infrastruktur, misalnya, diharapkan menjadi penggerak pemerataan pembangunan, tetapi dapat memperparah ketimpangan jika hanya terpusat di wilayah tertentu. Inflasi sebagai indikator makroekonomi memiliki implikasi langsung terhadap daya beli masyarakat miskin. Upah minimum merupakan kebijakan proteksi sosial yang dapat berdampak ambivalen terhadap distribusi pendapatan, sedangkan instrumen keuangan syariah memiliki potensi unik dalam mendukung inklusi keuangan dan keadilan distribusi dalam perspektif ekonomi Islam.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan struktural yang digunakan, di mana pengaruh keempat variabel eksogen tersebut tidak hanya dianalisis secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan, tetapi juga secara tidak langsung melalui dua variabel intervening, yaitu penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja menjadi representasi penting

di mana mana pasar tenaga kerja mampu menyalurkan manfaat pembangunan luas. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur utama



keberhasilan pembangunan, namun kerap kali tidak menjamin pemerataan pendapatan jika tidak disertai dengan mekanisme distribusi yang efektif.

Dengan menggunakan model simultan, penelitian ini mampu mengidentifikasi jalur pengaruh langsung dan tidak langsung, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai mekanisme transmisi kebijakan terhadap ketimpangan pendapatan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat fondasi teoritis dalam studi pembangunan, tetapi juga menghasilkan temuan empiris yang lebih aplikatif untuk mendukung formulasi kebijakan ekonomi yang inklusif dan berbasis bukti.

Selain memberikan kontribusi terhadap literatur akademik, penelitian ini juga memiliki urgensi praktis yang tinggi dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada Tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif), Tujuan 9 (infrastruktur yang merata), dan Tujuan 10 (pengurangan ketimpangan). Hasil temuan ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, penetapan upah minimum yang adaptif, serta pengembangan instrumen keuangan syariah yang pro-poor.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk menjawab permasalahan ilmiah tentang hubungan antara berbagai indikator ekonomi dan ketimpangan pendapatan, tetapi juga untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan ekonomi makro dan hasil pembangunan yang berkeadilan.



dasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk mengkaji lebih jauh ra belanja infrastruktur, inflasi, upah minimum dan instrumen keuangan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Apakah variabel-

variabel tersebut mampu membawa masyarakat Indonesia untuk merasakan pemerataan pendapatan secara langsung atau akan jauh lebih efektif bila dimediasi melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan konsep ini, masalah ketimpangan pendapatan diharapkan dapat ditelaah lebih rinci sehingga mampu melahirkan kebijakan untuk merealisasikan pemerataan pendapatan yang tepat sasaran. Hal ini juga dapat memperkaya khazanah ilmu ekonomi khususnya dalam masalah ketimpangan pendapatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Infrastruktur berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Apakah Inflasi berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Apakah Upah Minimum berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
4. Apakah Instrumen Keuangan Syariah berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?



5. Apakah Belanja Infrastruktur berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
6. Apakah Inflasi berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
7. Apakah Upah Minimum berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
8. Apakah Instrumen Keuangan Syariah berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Infrastruktur secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia



4. Untuk mengetahui pengaruh Instrumen Keuangan Syariah secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Infrastruktur secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
6. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
7. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
8. Untuk mengetahui pengaruh Instrumen Keuangan Syariah secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi input tambahan bagi semua pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Menambah karya empiris yang berkaitan dengan kemajuan dan pembangunan bangsa dengan variable-variabel yang terkait yaitu belanja infrastruktur, inflasi, upah minimum dan instrumen keuangan syariah, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.



2. Memberikan tambahan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan dan mencari solusi yang tepat untuk mencapai pemerataan pendapatan yang diharapkan.
3. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dan bisa dikembangkan oleh peneliti lain.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah penelitian tentang determinan ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan menjadikan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Penelitian ini meliputi keseluruhan Indonesia dengan menggunakan data sekunder dalam kurun waktu sepuluh tahun yaitu dari tahun 2013 hingga 2023.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan telah lama menjadi salah satu persoalan fundamental dalam ekonomi pembangunan dan menjadi perdebatan teoritis sejak masa klasik hingga kontemporer. Karl Marx (1867/1976) menegaskan bahwa ketimpangan merupakan konsekuensi inheren dari kapitalisme, karena akumulasi modal hanya menguntungkan kelas borjuis sementara kelas proletar semakin tereksplorasi. Ricardo bahkan sejak awal mengaitkan persoalan distribusi dengan perbedaan upah, laba, dan sewa tanah. Dalam kerangka klasik ini, ketimpangan dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam sistem kapitalis.

Pandangan berbeda muncul dari Nicholas Kaldor (1956) yang menyatakan bahwa ketimpangan justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kelompok kaya memiliki kecenderungan menabung lebih tinggi, sehingga tabungan nasional meningkat, investasi bertambah, dan pertumbuhan dapat dipacu. Pandangan ini kemudian melahirkan logika trickle-down economics, yaitu gagasan bahwa kekayaan kelompok kaya pada akhirnya akan “menetes ke bawah” melalui penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, bukti empiris modern, seperti yang diuraikan Piketty (2014), menunjukkan bahwa



gan cenderung memperlebar jurang sosial dan distribusi kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sehingga efek trickle-down ak berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu teori berpengaruh lainnya adalah hipotesis kurva U terbalik dari Kuznets (1955), yang menyatakan bahwa ketimpangan akan meningkat pada tahap awal pembangunan karena sebagian kecil masyarakat lebih cepat mengakses sektor modern. Namun, pada tahap selanjutnya, ketimpangan akan menurun seiring dengan redistribusi, peningkatan pendidikan, dan kebijakan sosial. Teori ini menjadi sangat populer dan sempat menjadi rujukan kebijakan di banyak negara, meskipun bukti empiris belakangan menunjukkan bahwa dalam era globalisasi, pertumbuhan tinggi tidak selalu disertai penurunan ketimpangan.

Arthur Lewis (1954) menambahkan perspektif dualisme ekonomi, dengan menjelaskan bahwa negara berkembang pada dasarnya terdiri dari dua sektor: tradisional subsisten dan modern kapitalis. Pertumbuhan awal lebih banyak terkonsentrasi di sektor modern, sehingga menciptakan kesenjangan antar sektor. Pandangan ini sejalan dengan teori Boeke (1953) yang menekankan adanya dualisme sosial-ekonomi di negara berkembang.

Berbeda dari pandangan tersebut, Keynes (1936) berargumen bahwa ketimpangan justru berbahaya bagi stabilitas ekonomi. Melalui teori permintaan efektif, ia menekankan bahwa kelompok kaya memiliki kecenderungan konsumsi lebih rendah dibanding kelompok miskin, sehingga distribusi pendapatan yang timpang akan menurunkan daya beli mayoritas masyarakat. Lemahnya permintaan agregat inilah yang menghambat pertumbuhan jangka panjang. Oleh sebab itu, pemerataan dianggap penting bukan hanya dari segi keadilan, tetapi juga untuk menjaga kestabilan makroekonomi.

Dalam konteks global, teori dependensia yang dikemukakan Frank (1967)

kan bahwa integrasi negara berkembang dalam sistem kapitalisme global memperlebar kesenjangan, karena negara pusat mengeksploitasi negara



pinggiran. Wallerstein (1974) melalui World System Theory memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa sistem dunia secara struktural menciptakan ketimpangan yang bersifat permanen.

Ketimpangan juga dipahami melalui teori modal manusia. Becker (1993) menyatakan bahwa perbedaan akses pendidikan dan keterampilan menjadi faktor utama yang menentukan distribusi pendapatan. Amartya Sen (1999) kemudian memperluas pandangan ini dengan Capability Approach, yang menekankan bahwa pembangunan sejati adalah peningkatan kapabilitas manusia, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan menurut Sen harus dipahami sebagai keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebebasan yang menghambat pembangunan inklusif.

Sejalan dengan itu, Dudley Seers (1969) mengkritik paradigma pembangunan yang hanya berfokus pada PDB. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak dapat disebut berhasil apabila tiga masalah utama—kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan—masih meluas. Konsep growth without development yang ia perkenalkan menggambarkan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tidak disertai pemerataan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam kajian institusional, Acemoglu dan Robinson (2012) menegaskan bahwa ketimpangan sering kali berakar pada institusi politik-ekonomi yang eksklusif. Ketika institusi hanya menguntungkan kelompok elite, distribusi kekayaan semakin timpang dan pembangunan jangka panjang terhambat. Sebaliknya, institusi inklusif yang membuka akses luas bagi masyarakat dapat

kan pertumbuhan yang lebih merata.



Literatur modern kemudian semakin menekankan bahwa ketimpangan merupakan hambatan serius bagi pembangunan. Stiglitz (2012) berargumen bahwa ketimpangan ekstrem merusak demokrasi, menurunkan mobilitas sosial, dan memicu instabilitas sosial-politik. Piketty (2014) memperkuat pandangan ini dengan bukti historis bahwa tingkat pengembalian modal (r) cenderung lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi (g), sehingga tanpa intervensi redistributif, konsentrasi kekayaan pada kelompok atas akan terus meningkat.

Dari keseluruhan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa perdebatan utama mengenai ketimpangan terbagi ke dalam dua kutub besar. Di satu sisi, ada pandangan yang melihat ketimpangan sebagai konsekuensi alamiah pembangunan bahkan bisa mendorong pertumbuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh Kaldor, Kuznets, dan Lewis. Di sisi lain, banyak teori modern yang memandang ketimpangan sebagai hambatan serius terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan stabilitas sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Keynes, Sen, Seers, Stiglitz, Piketty, serta Acemoglu dan Robinson. Perspektif dependensia dan sistem dunia menambahkan dimensi global ketimpangan, sedangkan teori institusional menekankan pentingnya tata kelola dan kualitas institusi. Dengan demikian, pembangunan tidak dapat hanya diukur melalui pertumbuhan PDB, tetapi juga harus memperhatikan dimensi pemerataan, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dijadikan untuk indikator dalam mengukur pemerataan distribusi pendapatan, yaitu:

1. Index Theil



eks Theil merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam konomi untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan

maupun kekayaan. Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh Henri Theil, seorang ekonom yang mengembangkan konsep tersebut berdasarkan teori informasi. Dalam konteks ketimpangan, Indeks Theil menggambarkan sejauh mana distribusi aktual suatu variabel, seperti pendapatan, menyimpang dari kondisi ideal di mana setiap individu atau kelompok memperoleh proporsi yang sama. Karena sifatnya yang mengukur ketidakpastian atau ketidakseimbangan dalam distribusi, Indeks Theil sering digolongkan sebagai bagian dari ukuran entropi. Hal ini menjadikannya salah satu alat analisis yang penting untuk memahami struktur sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat.

Indeks Theil terdiri atas dua varian utama, yaitu Theil T dan Theil L. Meskipun berbeda dalam sensitivitas, keduanya saling melengkapi. Theil T lebih peka terhadap perubahan pada kelompok berpendapatan tinggi, sementara Theil L lebih menekankan perubahan di kelompok berpendapatan rendah. Dengan menggunakan kedua ukuran ini, analisis ketimpangan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika distribusi pendapatan.

Nilai Indeks Theil berada dalam rentang nol hingga tak terbatas. Nilai nol menunjukkan distribusi yang benar-benar merata, sedangkan semakin tinggi nilai indeks menandakan tingkat ketimpangan yang lebih besar. Salah satu keunggulan utama dari Indeks Theil adalah kemampuannya untuk didekomposisi ke dalam dua komponen, yakni ketimpangan di dalam kelompok (*within-group inequality*) dan ketimpangan antar kelompok (*between-group inequality*). Dengan keunggulan ini, peneliti dapat menelusuri lebih jauh sumber ketimpangan, apakah lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan antar wilayah, sektor ekonomi, atau demografi atau justru berasal dari perbedaan di dalam kelompok yang sama.



Kelebihan lain dari Indeks Theil adalah kemampuannya digunakan dalam berbagai konteks, baik nasional, regional, maupun global. Dalam penelitian lintas negara, misalnya, Indeks Theil mampu menunjukkan kontribusi masing-masing negara terhadap ketimpangan global, sehingga memberikan dasar yang lebih jelas bagi analisis komparatif. Oleh karena itu, indeks ini sering dipadukan dengan indikator lain seperti Koefisien Gini agar dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai ketimpangan.

Dalam ranah kebijakan, Indeks Theil memiliki peran strategis karena mampu memberikan gambaran detail mengenai struktur ketimpangan. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Dengan demikian, Indeks Theil tidak hanya berfungsi sebagai instrumen analisis akademik, tetapi juga sebagai alat yang relevan bagi pengambil kebijakan untuk merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan dari penduduk. Kurva Lorenz ini terletak dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambungkan persentase kumulatif dari pendapatan nasional sedangkan dari sisi datanya mewakili persentase kumulatif dari penduduk. Kurva ini ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar. Apabila kurva Lorenz semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan bahwa distribusi pendapatan nasional semakin merata. Namun sebaliknya, apabila kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka mencerminkan

semakin memburuk, dimana distribusi pendapatan nasional semakin uga tidak merata.



3. Indeks Gini atau Gini Rasio

Gini rasio adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu masyarakat. Perhitungan Gini rasio didasarkan pada perbandingan antara garis diagonal yang menggambarkan distribusi sempurna dan kurva Lorenz yang menunjukkan distribusi aktual. Semakin besar perbedaan antara keduanya, semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi. Dengan kata lain, Gini rasio mengukur sejauh mana distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat menyimpang dari kondisi ideal di mana setiap individu memperoleh bagian yang sama.

Dalam proses perhitungannya, data yang dibutuhkan biasanya mencakup jumlah rumah tangga atau penduduk serta rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang telah dikelompokkan menurut kelas tertentu. Dari data tersebut kemudian diperoleh proporsi penduduk pada setiap kelas dan persentase kumulatif pendapatan atau pengeluaran, yang menjadi dasar dalam menentukan nilai Gini rasio.

Nilai Gini rasio selalu berada dalam rentang antara nol hingga satu. Nilai mendekati nol menunjukkan distribusi pendapatan atau kekayaan yang sangat merata, sedangkan nilai mendekati satu menandakan ketimpangan yang sangat tinggi. Dalam praktiknya, Gini rasio yang berada pada kisaran rendah menunjukkan ketidaksetaraan yang relatif kecil, sementara nilai yang lebih tinggi mengindikasikan distribusi yang semakin tidak merata. Dengan demikian, Gini rasio menjadi alat yang sangat berguna dalam menganalisis sejauh mana hasil

jumlahan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,



sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

4. Kriteria Bank Dunia

Kriteria ketidakmerataan versi bank dunia yang didasarkan dari porsi pendapatan nasional yang dinikmati dari tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan parah jika 40% penduduk berpendapatan rendah kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan yang dianggap sedang ataupun moderat jika 40% penduduk miskin menikmati antara 12-17% pendapatan nasional. Sedangkan apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan dikatakan lunak dan distribusi pendapatan nasional ini dianggap cukup merata.

5. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah atau daerah, dengan dasar perhitungan yang mengaitkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dengan jumlah penduduk di setiap wilayah. Indeks ini penting karena tidak hanya menunjukkan ketimpangan pendapatan secara umum, tetapi juga mampu menggambarkan sejauh mana kesenjangan pembangunan terjadi antar daerah dalam satu negara. Semakin kecil nilai indeks Williamson yang mendekati nol, semakin kecil pula kesenjangan antar wilayah, sedangkan nilai yang mendekati satu menandakan semakin besar kesenjangan yang ada. Dengan demikian,



i menjadi salah satu alat evaluasi penting dalam menilai keberhasilan
punan daerah, karena dari hasil perhitungannya dapat diketahui sejauh

mana pemerataan pembangunan telah tercapai dan di mana letak ketimpangan yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan berikutnya.

Dalam mengkaji persoalan ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia, pemilihan alat ukur yang tepat menjadi hal yang sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan mendalam. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Theil, karena memiliki kemampuan yang tidak hanya mengukur tingkat ketimpangan secara umum, tetapi juga mampu didekomposisi menjadi ketimpangan antarwilayah dan di dalam wilayah. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik ekonomi daerah yang sangat beragam.

Selain itu, Indeks Theil juga lebih sensitif terhadap perubahan di bagian distribusi yang ekstrem, seperti kelompok masyarakat sangat miskin atau sangat kaya, dibandingkan dengan ukuran ketimpangan lainnya seperti Gini Ratio. Keunggulan inilah yang menjadikan Theil sebagai alat analisis yang banyak digunakan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia dan UNDP dalam studi ketimpangan dan pembangunan regional. Dengan kemampuan analitis yang kuat serta relevansinya dalam mendukung kebijakan berbasis data, Indeks Theil dinilai paling tepat untuk digunakan dalam disertasi ini guna memahami dinamika ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia selama periode analisis.

2.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan, baik yang sedang aktif bekerja, sementara tidak bekerja, yang sedang mencari pekerjaan (ILO, 2020). Undang-Undang No. 13 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa tenaga kerja adalah yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa.



Dalam konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan terjadinya transformasi struktur tenaga kerja, di mana dominasi sektor agraris dan manufaktur perlahan bergeser ke sektor jasa yang semakin meningkat kontribusinya. Perubahan ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak lagi hanya ditentukan oleh pola pembangunan tradisional, melainkan juga oleh dinamika modernisasi ekonomi.

Pandangan klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo menekankan bahwa kesempatan kerja akan terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar, di mana penawaran dan permintaan tenaga kerja bertemu dalam titik keseimbangan. Ricardo bahkan menekankan pentingnya produktivitas sektor produksi sebagai faktor utama yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja (Todaro & Smith, 2020). Namun, Keynes (2013) mengkritik optimisme klasik tersebut dengan menegaskan bahwa kesempatan kerja tidak akan tercipta secara otomatis karena pasar sering gagal menyerap seluruh angkatan kerja. Dalam pandangan Keynesian, permintaan agregat merupakan faktor penentu utama, sehingga campur tangan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter menjadi instrumen vital dalam memperluas kesempatan kerja.

Selain persoalan pasar dan kebijakan, perkembangan teknologi juga memunculkan dinamika baru. Inovasi digitalisasi dan otomatisasi terbukti membuka lapangan kerja baru di sektor berbasis keterampilan tinggi, namun pada saat yang sama mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor tradisional (World Bank, 2021). McKinsey (2021) menekankan pentingnya kesiapan keterampilan

ar tenaga kerja tidak tertinggal dalam arus transformasi tersebut. Hal ini dengan gagasan Schumpeter (2010) mengenai *creative destruction*,



bahwa setiap inovasi menciptakan peluang baru sekaligus menghilangkan jenis pekerjaan lama. Dengan demikian, teknologi dipandang ambivalen: di satu sisi menjadi motor penciptaan efisiensi dan pekerjaan baru, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko pengangguran struktural.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah kebijakan upah minimum. Teori neoklasik menyatakan bahwa kenaikan upah minimum akan meningkatkan biaya tenaga kerja dan menurunkan permintaan terhadap pekerja, terutama di sektor padat karya (Neumark et al., 2018). Namun, penelitian Card dan Krueger (1994) memberikan hasil berbeda, di mana kenaikan upah minimum justru tidak menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja, bahkan dapat memperkuat daya beli pekerja dan mendorong permintaan agregat. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan upah minimum dapat berdampak positif maupun negatif, sangat bergantung pada struktur ekonomi dan produktivitas di masing-masing negara.

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang semakin menentukan. UNESCO (2023) menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi. ADB (2022) juga menunjukkan bahwa akses pendidikan dan pelatihan mampu mengurangi ketimpangan regional dalam pasar tenaga kerja. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Amartya Sen (1999) melalui pendekatan *capability*, yang menekankan bahwa pembangunan harus memperluas kapabilitas manusia agar mampu memperoleh pekerjaan yang produktif. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan

itas, tetapi juga memperluas akses terhadap kesempatan kerja yang lebih as dan merata.



Hubungan antara penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan juga menimbulkan perbedaan pandangan. Model dualisme Lewis (1954) menyatakan bahwa pertumbuhan terjadi ketika surplus tenaga kerja dari sektor tradisional berpindah ke sektor modern yang lebih produktif, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi motor pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan. Namun, Stiglitz (2012) mengingatkan bahwa tanpa regulasi yang inklusif, pertumbuhan justru bisa memperbesar ketimpangan karena akses pekerjaan berkualitas cenderung lebih mudah dinikmati kelompok tertentu. IMF (2023) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif mensyaratkan adanya tenaga kerja terdidik dan terampil sehingga penyerapan di sektor formal dapat memperkecil ketimpangan.

Dalam praktik kebijakan, pemerintah Indonesia berusaha memperluas kesempatan kerja melalui program-program seperti Kartu Prakerja, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan vokasi (Bappenas, 2022). Langkah ini merupakan bentuk campur tangan negara untuk mengatasi keterbatasan mekanisme pasar dalam menciptakan lapangan kerja. Pada akhirnya, penyerapan tenaga kerja berada pada titik pertemuan antara mekanisme pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, serta kualitas sumber daya manusia. Interaksi keempat faktor ini akan menentukan sejauh mana pasar tenaga kerja mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi



tumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan peningkatan jumlah dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat yang berdampak pada

peningkatan kesejahteraan. Namun, konsep ini berbeda dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sekadar menunjukkan bertambahnya output total, sementara pembangunan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita yang berkesinambungan dan disertai perubahan struktur sosial-ekonomi (Todaro, 2000). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan perbaikan distribusi kesejahteraan masyarakat.

Distribusi pendapatan yang timpang dalam suatu negara justru dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Todaro (2000) menegaskan bahwa pemerataan yang adil merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, teori Simon Kuznets (1995, dalam Todaro, 2000) menjadi rujukan penting melalui hipotesis kurva-U terbaliknya. Kuznets berpendapat bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat karena hanya sebagian masyarakat yang dapat menikmati hasil pembangunan. Namun, seiring waktu, pertumbuhan ekonomi dapat memperbaiki distribusi pendapatan karena semakin banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi modern.

Pandangan ini kemudian diperkaya oleh temuan empiris Ravallion dan Chen (1997, dalam Waluyo, 2006) yang menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi justru cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan dibandingkan memperburuknya. Dengan demikian, ada dua perspektif yang saling berhadapan: pertama, hipotesis Kuznets yang melihat ketimpangan meningkat di tahap awal pertumbuhan; kedua, temuan

dan Chen yang menyatakan bahwa pertumbuhan dapat sekaligus instrumen pengurang kesenjangan.



Dalam konteks regional, Tarigan (2005) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dari tambahan pendapatan masyarakat yang tercermin melalui nilai tambah di wilayah tersebut. Perhitungan ini lazim dilakukan dengan harga konstan untuk menghindari distorsi inflasi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum tentu menghasilkan pembangunan ekonomi yang merata. Hal ini karena pertumbuhan sering berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga kenaikan output total tidak selalu meningkatkan pendapatan per kapita. Pandangan ini sejalan dengan Abd Hamid P (2010) yang menyoroti peran desentralisasi fiskal. Menurutnya, desentralisasi dapat mendorong efisiensi alokasi sumber daya dan memacu pertumbuhan daerah, tetapi tanpa tata kelola yang baik justru berpotensi memperbesar ketimpangan antarwilayah.

Lebih jauh, Todaro dan Smith (2020) menekankan bahwa terdapat tiga faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, serta kemajuan teknologi. Akumulasi modal meliputi investasi pada aset fisik maupun sumber daya manusia, termasuk pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang disertai perluasan angkatan kerja dipandang sebagai faktor positif, karena memperbesar produktivitas sekaligus memperluas pasar domestik. Sementara itu, kemajuan teknologi menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya, dan meningkatkan daya saing.

Secara teoretis, hubungan antara investasi, pertumbuhan, dan ketimpangan dapat pula dijelaskan melalui Teori Harrod-Domar. Teori ini menekankan pada investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan jangka panjang. Menurut Harrod dan Domar, keberlanjutan pertumbuhan hanya dapat terjaga jika



tingkat tabungan dan investasi cukup untuk menopang pertambahan kapasitas produksi (steady growth). Dalam praktiknya, investasi yang diarahkan pada sektor produktif dapat mempercepat pertumbuhan sekaligus mempersempit kesenjangan, meskipun beberapa studi empiris menunjukkan adanya variasi hasil. Misalnya, Islamiah (2021) menemukan bahwa variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran justru memperbesar kesenjangan.

Dengan demikian, kajian literatur memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kompleks dengan ketimpangan pendapatan. Satu sisi, pertumbuhan dapat memperbesar kesenjangan pada tahap awal, sebagaimana diteorikan oleh Kuznets. Namun, pada sisi lain, pertumbuhan dapat pula menjadi sarana pengurang ketimpangan jika didukung oleh kebijakan distribusi yang inklusif, desentralisasi fiskal yang efektif, dan investasi produktif yang merata.

2.1.4 Belanja Infrastruktur

Belanja infrastruktur merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana publik, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, transportasi, sistem air bersih, listrik, serta fasilitas umum lainnya. Infrastruktur memainkan peran vital dalam menunjang produktivitas ekonomi, memperlancar arus perdagangan, menurunkan biaya transaksi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penyediaan infrastruktur kerap menghadapi dua kendala

yaitu kegagalan pasar dan keterbatasan pembiayaan. Yanuar dalam (2009) menjelaskan bahwa kegagalan pasar terjadi karena manfaat



infrastruktur bersifat eksternalitas positif yang dinikmati oleh masyarakat luas, sehingga swasta cenderung enggan berinvestasi tanpa adanya intervensi pemerintah. Oleh karena itu, negara dianggap perlu mengambil peran strategis dalam penyediaan infrastruktur.

Secara teoretis, Todaro dan Smith (2020) menekankan bahwa infrastruktur mencakup fasilitas yang menunjang aktivitas ekonomi, seperti jaringan komunikasi, energi, dan air bersih. Hal ini sejalan dengan Mankiw (2020) yang menyebut infrastruktur sebagai bentuk investasi pemerintah dalam *public capital* atau modal publik. World Bank (1994), melalui laporan *World Development Report*, menegaskan bahwa wilayah dengan infrastruktur memadai memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang infrastrukturnya terbatas. Definisi yang lebih luas dikemukakan Maryaningsih et al. (2014) yang membedakan infrastruktur menjadi infrastruktur ekonomi (transportasi, listrik, air, sanitasi) dan infrastruktur sosial (pendidikan, kesehatan). Selain itu, World Bank (1994) menambahkan dimensi infrastruktur institusional berupa sarana hukum dan administrasi. Pandangan ini dipertegas oleh Pearce (1986) yang mengartikan infrastruktur sebagai sarana dan prasarana yang memfasilitasi aliran barang dan jasa dalam perekonomian, serta Hirschman (1958) yang menempatkan infrastruktur sebagai prasyarat mendasar dalam menunjang produksi lintas sektor.

Dari sisi empiris, dampak infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan menimbulkan hasil yang beragam. Beberapa studi menunjukkan pengaruh positif infrastruktur dalam mempersempit kesenjangan. Calderón dan Servén (2004)



ong dan Calderón (2004) menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan melalui peningkatan produktivitas. Charlery et al. (2016) dan Hooper

et al. (2018) menambahkan bahwa pembangunan jalan meningkatkan akses ke pasar, memperluas lapangan kerja, serta memperbaiki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa infrastruktur dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung pembangunan yang inklusif.

Namun, hasil penelitian lain justru mengindikasikan dampak sebaliknya. Bajar dan Rajeev (2016) serta Majumder (2012) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur fisik di India memperburuk ketimpangan pendapatan, karena manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi. Fenomena serupa terjadi di Indonesia, di mana infrastruktur transportasi dan energi terbukti lebih menguntungkan daerah maju dan kelompok masyarakat berdaya beli tinggi (Makmuri, 2017). Brakman et al. (2002) juga menunjukkan bahwa belanja infrastruktur yang terfokus pada daerah perkotaan dan kawasan berkembang cenderung meningkatkan disparitas regional. Zhuang et al. (2014) memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa globalisasi, teknologi, dan liberalisasi pasar seringkali memperparah kesenjangan karena lebih menguntungkan pekerja terampil dibandingkan pekerja tidak terampil.

Perbedaan hasil temuan tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik teori mengenai peran infrastruktur dalam pembangunan. Satu sisi menekankan fungsi infrastruktur sebagai *equalizer* yang membuka akses luas bagi masyarakat miskin, sementara sisi lain menyoroti potensi bias pembangunan yang justru memperbesar ketimpangan. Untuk itu, arah kebijakan infrastruktur perlu



imbang dimensi pemerataan. Calderón dan Servén (2008; 2014)alkan penggunaan indeks sintetik untuk mengukur kualitas dan kuantitas tur secara lebih komprehensif sehingga dapat menjadi dasar perumusan

kebijakan yang lebih adil. Dengan strategi pembangunan infrastruktur yang inklusif, melibatkan sektor swasta, serta memperhatikan distribusi antarwilayah dan kelompok sosial, infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif dalam menekan ketimpangan pendapatan.

2.1.5 Inflasi

Inflasi secara umum didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam suatu perekonomian. Boediono (2008) menekankan bahwa kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi kecuali bila dampaknya meluas sehingga memengaruhi sebagian besar harga barang lain. Dengan kata lain, inflasi mencerminkan kecenderungan harga yang meningkat secara agregat, bukan perubahan harga yang bersifat sektoral. Definisi ini diperkuat oleh pandangan ekonom lain yang menekankan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter yang hampir selalu dialami oleh semua negara, baik negara maju maupun berkembang.

Menurut Nanga (2005), inflasi yang terjadi dalam suatu perekonomian membawa implikasi penting terhadap output dan tenaga kerja. Dalam kondisi inflasi ringan, perusahaan terdorong untuk meningkatkan jumlah produksi karena harga yang naik masih dalam batas wajar, sehingga keuntungan produsen meningkat. Situasi ini mendorong penyerapan faktor produksi termasuk tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan output nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila inflasi meningkat ke tingkat yang lebih



dahkan mencapai hiperinflasi, perusahaan justru akan mengurangi produksi karena biaya faktor produksi meningkat tajam dan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja menurun dan tingkat pengangguran

bertambah. Pandangan ini sejalan dengan teori Keynesian yang melihat adanya hubungan positif antara inflasi ringan dan peningkatan kesempatan kerja, tetapi hubungan tersebut bersifat sementara karena pada tingkat inflasi tinggi, efek yang timbul justru kontraproduktif (Keynes, 1936/2013).

Dalam literatur ekonomi, inflasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ringan terjadi ketika laju inflasi di bawah 10 persen, inflasi sedang berkisar antara 10 hingga 30 persen, inflasi tinggi berada pada kisaran 30 hingga 100 persen, sedangkan hiperinflasi terjadi bila laju inflasi melampaui 100 persen (Boediono, 2008). Klasifikasi ini penting untuk menilai seberapa besar gangguan inflasi terhadap stabilitas perekonomian. Inflasi ringan biasanya dianggap masih mampu mendorong pertumbuhan melalui stimulus produksi, sedangkan inflasi berat dan hiperinflasi menimbulkan distorsi besar terhadap alokasi sumber daya, kestabilan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan.

Inflasi juga dapat dibedakan menurut penyebabnya. *Demand-pull inflation* terjadi ketika permintaan agregat tumbuh lebih cepat daripada kapasitas penawaran. Kondisi ini sering dipicu oleh meningkatnya daya beli masyarakat sehingga mendorong harga barang dan jasa naik. Sebaliknya, *cost-push inflation* muncul akibat meningkatnya biaya produksi, misalnya kenaikan harga bahan baku atau upah tenaga kerja, yang menyebabkan produsen mengurangi penawaran dan menaikkan harga untuk menutupi biaya tambahan (Mankiw, 2020). Kedua jenis inflasi ini sering terjadi bersamaan, dan perdebatan di kalangan ekonom seringkali menyoroti faktor mana yang lebih dominan dalam menjelaskan laju inflasi di suatu negara.



Di segi asal-usulnya, inflasi dapat dibedakan menjadi inflasi domestik dan impor. Inflasi domestik disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan

perekonomian, baik pada sektor riil maupun moneter, termasuk kebijakan fiskal yang ekspansif atau tingginya jumlah uang beredar. Sementara itu, inflasi impor (*imported inflation*) terjadi ketika kenaikan harga barang-barang di luar negeri—khususnya di negara mitra dagang—menyebabkan naiknya harga barang di dalam negeri. Hal ini sering diperburuk oleh kenaikan biaya produksi yang membuat harga barang domestik ikut meningkat (Boediono, 2008). Dalam konteks globalisasi, *imported inflation* semakin relevan karena keterhubungan perdagangan internasional yang membuat transmisi harga lintas negara berlangsung cepat.

Dengan demikian, teori inflasi memperlihatkan spektrum pandangan yang luas. Sebagian menekankan perannya sebagai gejala normal yang bisa mendorong pertumbuhan ketika masih terkendali, sementara yang lain menyoroti risiko besar inflasi tinggi yang dapat mengganggu stabilitas makroekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan. Perdebatan antara inflasi yang bersifat *stimulus* versus inflasi yang bersifat *distorsi* inilah yang menjadikan fenomena inflasi tetap menjadi perhatian utama dalam teori dan kebijakan ekonomi.

2.1.6 Upah Minimum

Upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan melalui mekanisme disiplin dan loyalitas, sebagaimana dijelaskan oleh teori *efficiency wage*” (Katz, 1986; Shapiro & Stiglitz, 1984; Hassairi, 2016).. Upah yang dimaksudkan disini yaitu balas jasa yang berupa uang maupun jasa lainnya diberikan organisasi atau lembaga pekerjanya. Pemberian upah ini untuk menjaga dan karyawan di tempat kerjanya.



Upah yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja secara teoritis dipandang sebagai imbalan atau pengganti dari tenaga dan waktu yang telah dikorbankan oleh pekerja demi kepentingan proses produksi. Dalam praktiknya, upah yang diterima pekerja dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah sejumlah uang yang diterima pekerja secara rutin sebagai pembayaran atas jasa atau tenaga yang telah mereka sumbangkan dalam kegiatan produksi. Sementara itu, upah riil mengacu pada daya beli dari upah nominal tersebut, yaitu sejauh mana jumlah uang yang diterima mampu ditukar dengan barang dan jasa yang dibutuhkan pekerja. Dengan kata lain, meskipun upah nominal yang diterima pekerja dapat meningkat, nilai riilnya bisa saja menurun apabila harga barang dan jasa juga meningkat lebih cepat, sehingga kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetap terbatas.

Upah minimum adalah kebijakan yang bermanfaat dalam memastikan pekerja mendapatkan upah yang wajar sekaligus guna mencegah kemiskinan di kalangan pekerja yang mencakup pemenuhan standar kebutuhan hidup tenaga buruh. Pendistribusian kembali ini membuat pekerja pada skala gaji terendah menurunkan dispersi upah kemudian memungkinkan dapat meningkatkan agregat lewat efek multiplier. Pada beberapa negara upah minimum yaitu hal utama untuk penetapan upah nasional, yang tidak hanya menyediakan batasan upah secara umum namun dapat juga mempengaruhi upah, meningkatkan pendapatan dan mempunyai dampak yang penting untuk disperse upah keseluruhan.

Menurut Sony Sumarsono (2003) upah minimum adalah upah yang telah n secara minimum regional, sub sectoral. Terkait hal ini upah minimum ih pokok dan tunjangan. Sedangkan upah pokok minimum ialah upah



pokok yang diatur baik itu regional, sektoral dan sub sektoral. Dalam peraturan Pemerintah diatur dengan jelas hanya upah pokoknya saja tidak terhitung tunjangan. Sementara menurut Case & Fair (2006) yang dimaksud upah minimum ialah upah yang paling rendah yang mendapat izin untuk dibayar oleh perusahaan kepada pekerjanya.

Sasaran dari kebijakan upah minimum yaitu menutupi kebutuhan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Dalam mengukur keluarga dapat hidup layak maupun tidak maka dapat dilihat dari kesejahteraan pekerja dalam mendapatkan upah. Berdasarkan teori ekonomi, upah diartikan untuk pembayaran atas jasa-jasa fisik hingga mental yang telah disediakan tenaga kerja kepada para pengusaha dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dapat dibedakan antara pembayaran ke pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai yang tidak tetap.

Untuk yang bekerja di sektor formal yaitu target kebijakan upah minimum. Mereka yang bekerja tidak menerima upah dibawah upah minimum karena adanya peraturan tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan dalam mematuhi peraturan apabila tidak dilakukan akan dikenakan denda. Oleh sebab itu, upah minimum tidak hanya alat guna melindungi pekerja di bagian bawah skala upah namun sering terjadi “isu kelas menengah”, Levin Waldman dan Whalen (2007).

Pada saat yang sama, upah minimum digunakan dengan hati-hati untuk instrumen anti kemiskinan karena adanya dampak yang bergantung pada distribusi lapangan kerja pada tingkat rumah tangga. Hal ini membuat mereka tidak dapat dipakai untuk mengukur tingkat upah pada target grup tertentu.

angan harus dipastikan saat menetapkan upah minimum. Apabila n terlalu rendah, kemungkinan akan kehilangan targetnya. Ketika terlalu

